



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban secara formal atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2022 beserta analisisnya. Meskipun belum sempurna dalam penyusunannya namun diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja, optimalisasi peran serta meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis pada tahun selanjutnya yang pada akhirnya akan dapat memberikan dukungan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2023

Pt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis,



ISMETINOL, SP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660104 198708 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis menyebutkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2022 sebagaimana telah dievaluasi oleh Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Tingkat Kesempatan Kerja dengan target 95% (sembilan puluh lima persen) dengan realisasi 93,37% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen);
2. Predikat Akuntabilitas Kinerja dengan target BB (sangat baik) dengan realisasi BB (sangat baik);

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.4. Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	7
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Pengukuran Kinerja	15
3.2. Analisis Kinerja	17
3.3. Analisis Efisiensi	28
BAB IV REALISASI ANGGARAN	36
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 Sebelum Dilakukan Evaluasi SAKIP	10
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 Setelah Dilakukan Evaluasi SAKIP	11
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	13
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	14
Tabel 3.1	Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	17
Tabel 3.2	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2022	21
Tabel 3.3	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2022	23
Tabel 3.4	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan Tahun 2022	25
Tabel 3.5	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemandirian Transmigran Tahun 2022	26
Tabel 3.6	Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Menurut Usia, Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian Tahun 2022	29
Tabel 3.7	Data Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Menurut Tingkat Pendidikan 2022	30
Tabel 3.8	Data Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Dalam Jabatan Fungsional Tahun 2022	31
Tabel 3.9	Data Jumlah Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional Tahun 2022	31

Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	34
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	35
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	39
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah memerintahkan kepada seluruh jajaran birokrasi mulai dari departemen dan lembaga non departemen serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara tahun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud memuat laporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel. Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap tahunnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 mengacu dan berpedoman kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan laporan ini dapat tersusun dan tertata dengan baik guna memberikan gambaran yang jelas terhadap pertanggungjawaban keuangan dalam rangka mencapai visi, misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan tujuan, serta sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang telah dituangkan dalam dokumen rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021-2026.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022 serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan tujuan, serta sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang telah disepakati. Adapun tujuannya dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Merupakan sarana bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja;
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
5. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka setiap pemerintah daerah harus menyusun Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis diikuti dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis didukung oleh 41 (empat puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara dengan susunan organisasi sebagai berikut:

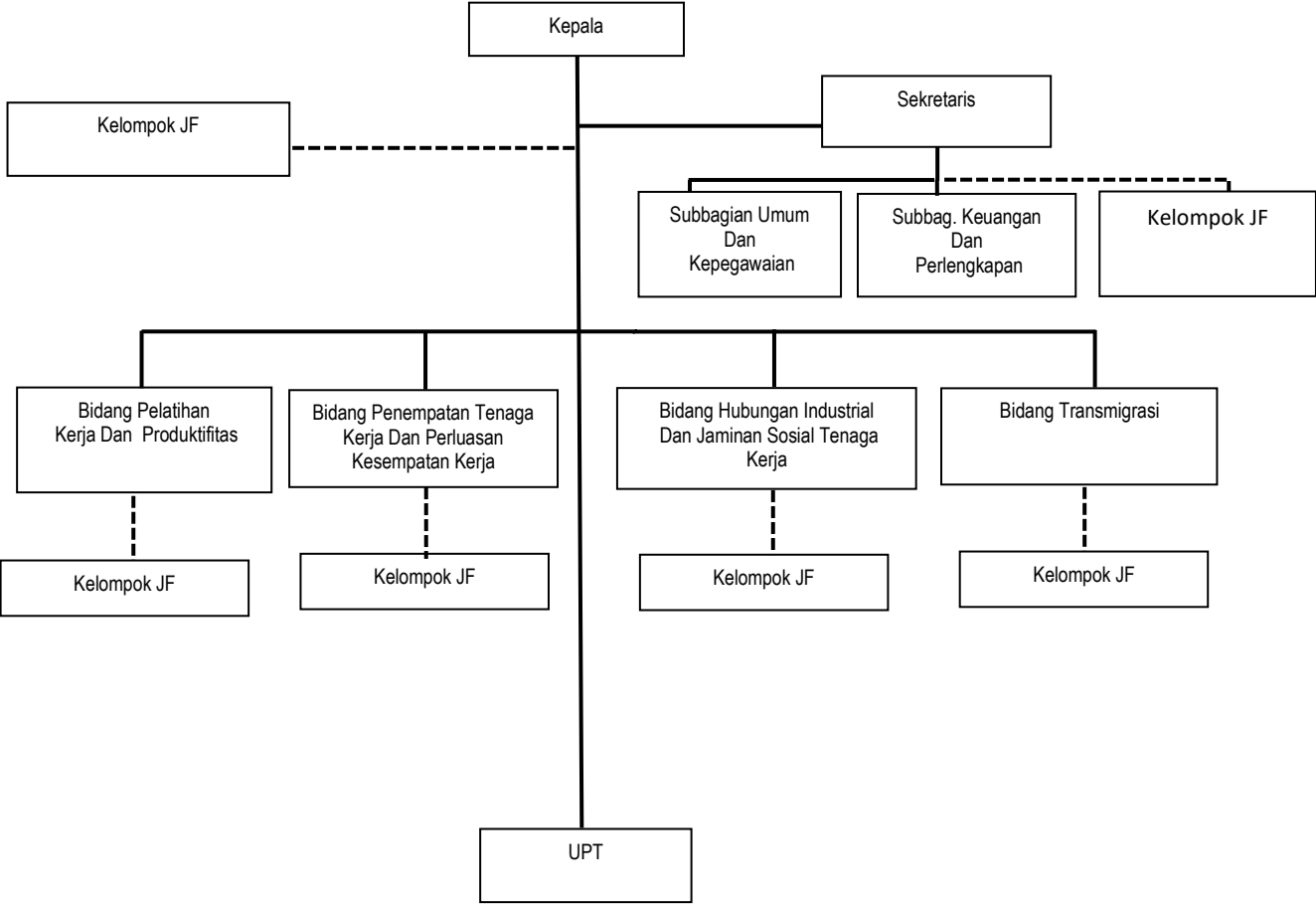
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dengan tugas melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan

barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum. Dalam melaksanakan tugas terkait sekretariat, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dengan tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, dengan tugas melaksanakan pengoordinasian di bidang pelatihan kerja dan produktivitas yang meliputi kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan serta analisis produktivitas yang dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan tugas melaksanakan pengoordinasian di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang meliputi penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja luar negeri dan pengembangan serta perluasan kesempatan kerja. Dalam pelaksanaan tugas terkait Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan tugas melaksanakan pengoordinasian di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan social tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam melaksanakan tugas terkait hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, Kepala Bidang

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;

6. Bidang Transmigrasi, dengan tugas pengoordinasian di bidang Transmigrasi yang meliputi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi dan penataan persebaran penduduk dan pengembangan masyarakat transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Transmigrasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan, bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Keberhasilan pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat yang bersifat *bottom up planning* dengan fakta dan kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis.

Dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2021-2026, memproyeksikan tentang sasaran atau kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Strategis tersebut serta kondisi yang ingin dicapai disetiap tahun dari perjalanan Rencana Strategis dimaksud dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan tahunannya disamping merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yakni **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”** dengan misinya antara lain:

- 1) Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian;
- 2) Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
- 3) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu program yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sesuai yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal* (TPB/ SDGs) yang ke 8 (delapan) yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Terkait gambaran visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta sebagai unsur penunjang urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka fungsi dan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terkait erat dengan pencapaian misi ke satu yakni mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian serta misi ke dua yakni mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 memuat sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan periode tahun 2021-2026 serta indikator-indikator capaian kinerja setiap tahun anggaran perjalanan Rencana Strategis dimaksud. Dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memuat 7 (tujuh) sasaran yakni menurunnya angka pengangguran, meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan, meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, menurunnya kasus ketenagakerjaan, meningkatnya kemandirian dan keberdayaan transmigran, terlaksananya perencanaan tenaga kerja daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dengan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama, persentase pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi, persentase pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi, persentase ketersediaan data ketenagakerjaan dan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2022 terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis pun melakukan perbaikan baik pada tujuan, sasaran utama maupun Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga menjadi lebih sederhana namun tidak mengurangi *esensi* dari tujuan dan sasaran kebijakan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dirumuskan menjadi meningkatkan kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yakni meningkatnya kesempatan kerja dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) indikator sasaran

antara lain (1) tingkat kompetensi, daya saing dan produktifitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja, (2) tingkat kesempatan kerja, (3) besaran kasus hubungan industrial yang terselesaikan, (4) tingkat kemandirian transmigran dan (5) predikat akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 Sebelum Dilakukan Evaluasi SAKIP

SEBELUM EVALUASI SAKIP										
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	8.54	8.44	8.54	8.64	8.75
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66.21	66.22	67.18	67.29	67.77	68.3
		Meningkatnya Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Persentase Pencari kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	95	95	96	96	97	97
		Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100
		Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	23	24	25	27	28	29
		Meningkatnya Kemandirian dan Keberdayaan Transmigran	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	%	NA	100	100	100	100	100
			Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%	NA	100	100	100	100	100
		Terlaksananya Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Ketersediaan Data Ketenagakerjaan	%	55	85	87	90	92	93
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	NA	50	60	65	65	65

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 Setelah Evaluasi SAKIP

SETELAH EVALUASI SAKIP										
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	Meningkatkan Kontribusi Non Migas Terhadap Perekonomian Daerah	1.1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	8,54	8,44	8,54	8,64	8,75
			Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100
			Tingkat Kesempatan Kerja	%	95	95	96	96	97	97
			Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan	%	23	24	25	27	28	29
			Tingkat Kemandirian Transmigran	%	100	100	100	100	100	100
2.	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	2.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	50	55	60	63	65	72
			Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	BB	BB	A	A	A

Peran strategis yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan antara lain:

1. Sebagai institusi strategis dalam perencanaan ketenagakerjaan daerah, pemberdayaan dan pembinaan lingkup transmigrasi;
2. Sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja wirausaha mandiri, pembinaan masyarakat produktif serta peningkatan kerjasama jejaring sosial masyarakat;
3. Sebagai koordinator hubungan industrial dalam menyongsong Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera.

Karenanya diperlukan penyusunan program yang tepat sasaran, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang jelas, sumber daya manusia yang profesional, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, koordinasi dan terpenuhinya sumber pendanaan yang memadai.

Pelaksanaan kinerja dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dilihat dari indikator yang terukur. Indikator tersebut harus dapat menjadi indikator utama dalam pengukuran suatu organisasi dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah dievaluasi oleh Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki tujuan meningkatkan kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan tingkat kesempatan kerja serta predikat akuntabilitas kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditandatangani dan disepakati antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dengan Bupati Bengkalis, yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dengan Bupati Bengkalis Tahun 2022.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan dan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishments* atau sanksi.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Bupati Bengkalis tahun 2022 memuat 2 (dua) sasaran yakni meningkatnya kesempatan kerja dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan 5 (lima) indikator kinerja yakni tingkat kompetensi, daya saing dan produktifitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja, besaran kasus hubungan industrial yang terselesaikan, tingkat kemandirian transmigran dan predikat akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	6
I.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja	%	100
		Tingkat Kesempatan Kerja	%	95
		Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang Terselesaikan	%	24
		Tingkat Kemandirian Transmigran	%	100
I.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Perjanjian Kinerja yang disepakati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dengan Bupati Bengkalis tahun 2022 mengacu kepada kesesuaian kedudukan, tugas, dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perjanjian Kinerja yang dibuat juga mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2021-2026 yang telah dievaluasi. Sehingga penetapan indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur dan menilai tingkat keberhasilan atau kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun bersangkutan.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	6
I.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	95
I.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Karenanya seluruh instansi pemerintah, badan dan lembaga baik pusat maupun daerah sesuai tugas dan fungsinya harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, dengan adanya kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan pengelolaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja disusun dengan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap selesainya kegiatan dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait

dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran. Program prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah (1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (2) Program Perencanaan Tenaga Kerja, (3) Program Penempatan Tenaga Kerja, (4) Program Hubungan Industrial, (5) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, (6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan (7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja yang didapat pada tahun 2022 tersebut. Pelaporan pengukuran kinerja sendiri berkaitan dengan suatu proses yang dinamakan pengelolaan pencapaian (*managing of result*). Proses tersebut timbul terhadap tuntutan yang meningkat bahwa manajemen pemerintahan perlu memakai pendekatan yang sama dengan manajemen sektor swasta maupun organisasi nir laba lainnya. Proses yang dilakukan merupakan proses yang menggunakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisasi terhadap misi, tujuan dan sasaran.

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan pencapaian (*managing of result*) sendiri meliputi perencanaan strategis, perencanaan program, menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya, perencanaan dan pengorganisasian kegiatan, manajemen operasi, pemantauan kegiatan dan pengukuran pencapaian, serta analisis pencapaian, pelaporan pencapaian dan adanya umpan balik mengenai capaian.

Tabel 3.1. Realisasi Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
I.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja	%	100	100
		Tingkat Kesempatan Kerja	%	95	**93,37
		Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan	%	24	94,74
		Tingkat Kemandirian Transmigran	%	100	65
I.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	BB

Catatan: Angka Tingkat Kesempatan Kerja menggunakan data tahun 2021 dikarenakan data tahun 2022 belum dikeluarkan oleh pihak BPS sebagai sumber data

3.2. Analisis Kinerja

Nilai capaian kinerja merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah dapat terlaksana dengan baik. Evaluasi pencapaian kinerja program prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 yang diakomodir ke dalam 2 (dua) sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesempatan kerja diakomodir enam program yaitu (1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (2) Program Perencanaan Tenaga Kerja, (3) Program Penempatan Tenaga Kerja, (4) Program Hubungan Industrial, (5)

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, (6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator capaian tingkat kompetensi, daya saing dan produktifitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja, besaran kasus hubungan industrial yang terselesaikan dan tingkat kemandirian transmigran.

1.1. Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja

Pada akhir tahun 2022 indikator tingkat kompetensi, daya saing dan produktifitas tenaga kerja yang ditargetkan 100% (seratus persen) telah direalisasikan sebesar 108% (seratus delapan persen) dengan tingkat capaian sebesar 100%. Indikator tingkat kompetensi, daya saing dan produktifitas tenaga kerja didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang mengakomodir 2 (dua) kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pagu anggaran yang harus dikelola sebesar Rp. 2.899.992.400,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk melaksanakan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dalam bentuk pelaksanaan beberapa jenis pelatihan berbasis kompetensi, antara lain pelatihan *welder, rigger*, instalasi listrik, perbengkelan, servis *handphone*, servis alat pendingin, pendidikan dasar satuan pengamanan, informasi teknologi (IT), *Training of Traniner (TOT)*, *Human Resource Departemen (HRD)* dan komputer telah diikuti oleh 216 (dua ratus enam belas) orang sebagaimana target yang telah direncanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.787.615.299,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setara dengan 96,12% (sembilan puluh enam koma dua belas persen). Dalam proses pelaksanaan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Berdasarkan Klaster Kompetensi sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja sebagai pelaksana pelatihan masih kurang memadai. Hal tersebut tidak sebanding dengan animo masyarakat Kabupaten Bengkalis yang ingin mengikuti pelatihan yang diadakan. Salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi adalah dibuka kesempatan lebih luas khususnya terkait jumlah peserta dan jenis pelatihan yang dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan peningkatan ketrampilan calon tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bengkalis baik pelatihan di bidang MIGAS maupun pelatihan ketrampilan usaha mandiri serta pengaturan jadwal pelatihan yang dapat dilaksanakan ke beberapa periode.

Kegiatan lain sebagai pendukung Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.996.300,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan target pembinaan terhadap 12 (dua belas) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta merupakan salah satu lembaga yang membantu pihak pemerintah dalam menangani masalah tenaga kerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang kompeten dalam meningkatkan keahlian dan ketrampilan calon tenaga kerja. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta menjadi lembaga yang akan mewadahi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan keahlian khusus agar dapat bersaing di era globalisasi industri.

Tahun 2022 bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terkait kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta berupa identifikasi jenis dan perizinan yang dimiliki oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan. Dari hasil identifikasi yang dilakukan diperoleh 12 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang telah memiliki izin operasi dan 2 (dua) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang perizinannya sedang dalam proses administrasi sehingga kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tersebut sebesar 117% (seratus tujuh belas persen) dengan anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 108.580.500,- (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setara dengan 72,39% (tujuh puluh dua koma tiga puluh sembilan persen).

Secara umum tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam rangka identifikasi jenis dan perizinan yang dimiliki oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada di Kabupaten Bengkalis. Jenis perizinan yang dimiliki oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada umumnya tidak memiliki batas waktu, hanya bersifat pasif atau aktif yang ditunjukkan dengan adanya laporan yang akan diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali (laporan semester).

Dapat disampaikan bahwa target indikator sasaran Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja sebesar 100% (seratus persen) dapat dicapai sesuai harapan. Sebagai bahan masukan dapat diantisipasi adanya penambahan target capaian pada jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina pada kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta serta metode pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi untuk dapat mengakomodir besarnya minat masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.2. Target, Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas
Tenaga Kerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	2022			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja	100	100	100	Tinggi

1.2. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja yakni persentase penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja, merupakan besaran angka yang mengindikasikan persentase angkatan kerja yang bekerja, semakin tinggi tingkat kesempatan kerja dapat diasumsikan bahwa kesempatan kerja semakin tinggi.

Capaian Indikator sasaran strategis Tingkat Kesempatan Kerja didukung oleh Program Perencanaan Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja. Program Perencanaan Tenaga Kerja merupakan program yang mengakomodir kegiatan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro. Dokumen tersebut berisi rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dengan target keluaran 1 (satu) dokumen. Dengan dukungan alokasi pendanaan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% (seratus persen) dan serapan anggaran sebesar Rp. 122.851.350,- atau setara dengan 98,28% (sembilan puluh delapan koma dua puluh delapan persen).

Program Penempatan Tenaga Kerja merupakan program yang mengakomodir kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan administrasi kartu pencari kerja (AK1) bagi para calon tenaga kerja dan *job fair* atau bursa kerja. Dukungan pendanaan diberikan sebesar Rp. 359.999.600,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) telah dilaksanakan dengan capaian kegiatan sebesar 100% (seratus persen) dan serapan anggaran sebesar Rp. 356.179.274,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setara dengan 98,94% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat persen). Secara umum kendala yang dihadapi tidak ada hanya saja diperlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan bursa kerja (*job fair*) baik dalam sistem penyampaian informasi kegiatan, sistem pendaftaran peserta maupun calon pencari kerja dan penanganan pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan masyarakat karena status pandemi Covid19 yang sampai saat ini masih berlaku. Ke depan diharapkan pelaksanaan bursa kerja (*job fair*) lebih mengedepankan faktor keamanan dan kesehatan masyarakat calon pencari kerja.

Besaran nilai Tingkat Kesempatan Kerja sendiri merupakan nilai yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja yang angkanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. Sampai dengan laporan ini disusun data tahun 2022 belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, karenanya dalam hal ini data masih menggunakan data tahun 2021 dan akan diperbaharui pada saat data tahun 2022 telah dipublikasikan.

Tabel 3.3. Target, Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	2022			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	95	**93,37	**98,28	Tinggi

**data tahun 2021

1.3. Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan. Beberapa jenis perselisihan hubungan industrial yang umumnya terjadi antara buruh dengan pengusaha antara lain:

- a. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- b. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

- d. Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan serikat pekerja/ serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial, yaitu perundingan bipartite, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Namun bila tetap tidak menemui kesepakatan maka tidak menutup kemungkinan akan berlanjut hingga pengadilan khusus perselisihan hubungan industrial.

Sepanjang tahun 2022 indikator sasaran strategis besaran kasus hubungan industrial telah menyerap anggaran sebesar Rp. 1.868.643.340,- (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau setara dengan 81,61% (delapan puluh satu koma enam puluh satu persen) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.289.848.900,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Anggaran tersebut digunakan sebagai dukungan pelaksanaan kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Berpotensi dalam 1 Daerah Kab./Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam bentuk disahkannya peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan, penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit.

Yang menjadi perhatian utama dalam Program Hubungan Industrial adalah beberapa kasus yang dapat terselesaikan melalui Perjanjian Bersama dan bipartite. Dari 19 (sembilan belas) kasus yang

dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 6 (enam) diantaranya diselesaikan dengan Perjanjian Bersama melalui Mediator dan 3 (empat) kasus diselesaikan melalui Bipartit, 9 (sembilan) kasus anjuran tingkat mediator sehingga jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 18 (delapan belas) kasus atau setara dengan 94,74% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh empat persen) dari target kinerja sebesar 24% (dua puluh empat persen).

Tabel 3.4. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang Terselesaikan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	2022			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang Terselesaikan	24	94,74	394,75	Sangat Tinggi

Selain kegiatan penyelesaian kasus hubungan industrial, program Hubungan Industrial juga mengakomodir pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden berupa dukungan dana untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Non Aparatur Sipil Negara bagi 50.099 (lima puluh ribu sembilan puluh sembilan) orang dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp. 1.209.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

1.4. Tingkat Kemandirian Transmigran

Masyarakat transmigran yang tinggal di Desa Cingam dan Makeruh merupakan transmigran lokal dimana seluruh biaya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Indikator sasaran strategis tingkat kemandirian transmigran yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2022 didukung oleh 2 (dua) program urusan pilihan yakni Program

Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 275.149.086,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) atau setara dengan 98,27% (sembilan puluh delapan koma dua puluh tujuh persen).

Dari target kinerja sebesar 100% (seratus persen) dapat direalisasikan sebesar 65% (enam puluh lima persen). Hal ini dikarenakan proses administrasi legalitas status kepemilikan lahan transmigrasi bagi masyarakat trans melibatkan banyak lintas sektor dan waktu yang tidak sedikit dan memerlukan kolaborasi yang lebih intens. Pada saat laporan ini disusun proses administrasi status kawasan transmigrasi yang berlokasi di Desa Cingam dan Desa Makeruh saat ini masih dilakukan di tingkat kementerian. Ke depan perlu dilakukan diskusi dan komunikasi yang lebih intens antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka memperjelas status kepemilikan lahan bagi masyarakat transmigran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah kongkrit selanjutnya sebagai upaya meningkatkan status kesejahteraan masyarakat transmigran yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.5. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Kemandirian Transmigran Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	2022			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kemandirian Transmigran	100	65	65	Sedang

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilihat dari komitmen dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang dimulai dengan disusunnya rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reuiu serta evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan harapan proses-preses yang dilaksanakan menjadi perwujudan dari akuntabilitas kinerja yang memiliki prinsip bahwa kinerja yang ditargetkan berorientasi pada pada hasil (*outcomes*), adanya keselarasan atau memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*) dan sinergitas (*alignment*), kinerja yang terukur dan relevan serta target kinerja yang terukur dan logis.

Sasaran strategis kedua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran predikat akuntabilitas kinerja (BB) yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.175.092.486,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bagi 8 (delapan) jenis kegiatan.

Delapan kegiatan tersebut antara lain kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah, kegiatan administrasi perangkat daerah, kegiatan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan kepegawaian perangkat daerah, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah, kegiatan pengadaan barang milik

daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang pada umumnya merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatus Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang telah dituangkan didalam Perjanjian Kinerja.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.175.092.486,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 10.469.127.288,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setara dengan 93,68% (sembilan puluh tiga koma enam puluh delapan persen). Beberapa kegiatan telah dilakukan efisiensi anggaran yakni kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah dan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pada jadwal jaga tenaga keamanan, efisiensi belanja baliho/spanduk, efisiensi belanja koran dan listrik.

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran predikat akuntabilitas kinerja (BB) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dapat tercapai sebagai wujud komitmen dari seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

3.3. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi ditinjau dari dua aspek, yakni personil dan anggaran. Jumlah personil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis adalah 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, 42

(empat puluh dua) orang adalah Aparatur Sipil Negara dan sisanya yakni 97 (sembilan puluh tujuh) orang adalah Tenaga Suka Rela (TKS) yang terbagi menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) orang laki-laki dan 60 (enam puluh) orang perempuan. Dari total 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang yang berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau 15,83% (lima belas koma delapan puluh tiga persen) dari total jumlah personil, yang berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang atau 23,02% (dua puluh tiga koma nol dua persen), yang berusia 30 (tiga puluh) tahun ke atas sebanyak 50 (lima puluh) orang atau 35,97% (tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh persen) dan yang berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang atau 25,18% (dua puluh lima koma delapan belas persen) dari keseluruhan personil yang diberdayakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.6. Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Menurut Usia, Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian Tahun 2022

No.	Status Pegawai	Uraian								Jumlah
		20 - 29		30 - 40		41 - 50		51 - 70		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(8)
1	Aparatur Sipil Negara	0	0	3	6	15	5	8	5	42
3	Tenaga Suka Rela	16	19	23	18	6	6	8	1	97
Jumlah		16	19	26	24	21	11	16	6	139
		35		50		32		22		139
%		25,18		35,97		23,02		15,83		100

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah personil yang diharapkan memiliki produktivitas yang optimal sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang atau 61,15% (enam puluh satu koma lima belas persen) dari keseluruhan jumlah personil yang ada, yakni personil yang berada pada usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 40 (empat puluh)

tahun karenanya kebutuhan personil sebagai sumber daya pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis cukup terpenuhi.

Pemenuhan produktivitas sumber daya yang menjadi dukungan pelaksanaan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tidak hanya dilihat dari faktor jumlah personil yang ada namun latar belakang pendidikan dan kompetensi juga merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun dianggap cukup terpenuhi dari faktor jumlah, namun sumber daya manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dianggap kurang memadai dari faktor pendidikan, kompetensi maupun ketrampilan. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terkait ketidaksesuaian kompetensi dan latar belakang pendidikan dengan tugas jabatan fungsional baru yang diamanahkan. Penyetaraan jabatan yang diharapkan akan dapat merampingkan sistem birokrasi yang telah berjalan menjadi lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik masih sulit untuk diwujudkan.

Tabel 3.7. Data Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Menurut Tingkat Pendidikan 2022

No.	Status Pegawai	Tingkat Pendidikan									Jumlah (Orang)
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aparatur Sipil Negara	0	4	26	0	4	0	0	8	0	42
2	Tenaga Suka Rela	0	2	18	0	6	2	0	62	7	97
Jumlah		0	6	44	0	10	2	0	70	7	139
%		0	4,32	31,65	0	7,19	1,44	0	50,36	5,04	100

Tabel 3.8. Data Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Dalam Jabatan Fungsional Tahun 2022

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah ASN
1	2	3
1	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	1
2	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	2
3	Pengantar Kerja Ahli Muda	3
4	Instruktur Ahli Muda	3
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2
6	Perencana Ahli Muda	2
7	Analisis Pengembangan Kompetensi	1
8	Pelaksana	0
Jumlah		14
%		33,33

Tabel 3.9. Data Jumlah Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional Tahun 2022

No.	Jenis Diklat Fungsional	Jumlah ASN
1	2	3
1	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	2
2	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	0
3	Pengantar Kerja Ahli Muda	0
4	Instruktur Ahli Muda	0
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0
6	Perencana Ahli Muda	0
7	Analisis Pengembangan Kompetensi	0
8	Pelaksana	0
Jumlah		2
%		14,29

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang personil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, yang memiliki latar pendidikan Strata Satu sebanyak 44 (empat

puluh empat) orang atau 31,65% (tiga puluh satu koma enam puluh lima persen) dan didominasi oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan SMA (sederajat) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang atau 50,36% (lima puluh koma tiga puluh enam persen). Dari 42 (empat puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 14 (empat belas) orang atau 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) diantaranya menduduki posisi sebagai fungsional dan hanya 2 (dua) orang yang telah mengikuti diklat fungsional sebagai mediator.

Minimnya ketrampilan dan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan program kegiatan yang menjadi tugas pelaksanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Namun demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Disamping juga meningkatkan kemampuan operasional dan teknis yang terus dikembangkan melalui jalur pendidikan dan pelatihan melalui berbagai media guna lebih meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Dari aspek anggaran, tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 14.267.250.611,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) untuk APBD Murni dan Rp. 17.279.929.686,- (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) untuk APBD Perubahan bagi pelaksanaan 7 (tujuh) program 16 (enam belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Sasaran strategis meningkatnya kesempatan kerja memperoleh total dukungan pendanaan sebesar Rp. 6.104.837.200,- (enam milyar seratus empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

yang terbagi untuk 4 (empat) indikator sasaran. Indikator sasaran Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja pagu anggaran sebesar Rp. 3.049.988.700,- (tiga milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp. 2.896.195.799,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setara dengan 94,96%.

Indikator sasaran Tingkat Kesempatan Kerja yang diakomodir oleh program Perencanaan Tenaga Kerja dan program Penempatan Tenaga Kerja memiliki total anggaran sebesar Rp. 484.999.600,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 479.030.624,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atau setara dengan 98,77% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen).

Indikator sasaran selanjutnya adalah Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan yang memiliki dukungan pendanaan sebesar Rp. 2.289.848.900,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) telah direalisasikan anggarannya sebesar Rp. 1.868.643.340,- (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau setara dengan 81,61% (delapan puluh satu koma enam puluh satu persen).

Indikator Tingkat Kemandirian Transmigran dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) mengakomodir dua program urusan ketransmigrasian yakni program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan program Pembangunan Kawasan Transmigrasi telah merealisasikan anggarannya sebesar Rp. 275.149.086,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) atau setara dengan 98,27% (sembilan puluh delapan koma dua puluh tujuh persen).

Sedangkan sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 11.175.092.486,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) untuk dukungan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 10.469.127.288,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setara dengan 93,68% (sembilan puluh tiga koma enam puluh delapan persen). Secara lebih jelas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
		%		
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja	100	94,96	5,04
	Tingkat Kesempatan Kerja	98,28	98,77	1,23
	Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan	394,75	81,61	18,39
	Tingkat Kemandirian Transmigran	65	98,27	1,73
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	93,68	6,32

Dari tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya anggaran pada masing-masing indikator kinerja telah efektif dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Sedangkan untuk melihat

perbandingan capaian kinerja dan anggaran secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (%)			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja	100	100	100	3.049.988.700	2.896.195.799	94,96
	Tingkat Kesempatan Kerja	95	93,37	98,28	484.999.600	479.030.624	98,77
	Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan	24	94,74	394,75	2.289.848.900	1.868.643.340	81,61
	Tingkat Kemandirian Transmigran	100	65	65	280.000.000	275.149.086	98,27
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	11.175.092.486	10.469.127.288	93,68

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengalokasikan dana sebesar Rp. Rp. 14.267.250.611,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) untuk APBD Murni dan Rp. 17.279.929.686,- (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) untuk APBD Perubahan bagi pelaksanaan 7 (tujuh) program 16 (enam belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 15.988.146.137,- (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setara dengan 92,52% (sembilan puluh dua koma lima puluh dua persen) digunakan untuk mendukung pelaksanaan:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan pagu anggaran yang harus dikelola sebesar Rp. 2.899.992.400,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.787.615.299,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setara dengan 96,12% (sembilan puluh enam koma dua belas persen) sebagai dukungan pencapaian indikator sasaran Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja;
2. Perencanaan Tenaga Kerja dengan target anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 122.851.350,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan 98,28% (sembilan puluh delapan koma dua puluh

delapan persen) guna mewujudkan indikator sasaran Tingkat Kesempatan Kerja;

3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp. 359.999.600,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 356.179.274,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setara dengan 98,94% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat persen) untuk pencapaian indikator sasaran Tingkat Kesempatan Kerja
4. Program Hubungan Industrial dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.289.848.900,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) telah menyerap anggaran sebesar Rp. 1.868.643.340,- (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau setara dengan 81,61% (delapan puluh satu koma enam puluh satu persen) untuk pencapaian indikator sasaran Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan;
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 197.308.286,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setara dengan 98,65% (sembilan puluh delapan koma enam puluh lima persen) untuk mewujudkan indikator sasaran Tingkat Kemandirian Transmigran;
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan pagu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 77.840.800,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setara dengan 97,30% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh persen) untuk mewujudkan indikator sasaran Tingkat Kemandirian Transmigran;

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.175.092.486,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 10.469.127.288,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setara dengan 93,68% (sembilan puluh tiga koma enam puluh delapan persen) untuk mencapai indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja.

Secara lebih jelas target anggaran dan realisasinya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN		
PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
URUSAN BIDANG TENAGA KERJA						16.999.929.686,00				15.712.997.051,00	92,43			
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.175.092.486,00			100	10.469.127.288,00	93,68	705.965.198,00	6,32	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	159.185.000,00	5	Dokumen	100	158.801.000,00	99,76	384.000,00	0,24
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam 12 Bulan	12	bulan	6.616.296.137,00	12	bulan	100	6.099.493.195,00	92,19	516.802.942,00	7,81
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa tenaga keamanan yang tersedia dalam satu tahun	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	38	Orang	691.200.000,00	38	Orang	100	691.200.000,00	100,00	-	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimibingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13	Orang	149.902.000,00	13	Orang	100	143.160.684,00	95,50	6.741.316,00	4,50

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN	
PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik yang tersedia	11	item	30.000.000,00	11	item	100	28.948.000,00	96,49	1.052.000,00	3,51
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	175.732.100,00	12	Bulan	100	175.685.800,00	99,97	46.300,00	0,03
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat yang disediakan makan dan minuman	50	kali	302.520.000,00	50	kali	100	267.230.000,00	88,33	35.290.000,00	11,67
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	18	item	121.719.000,00	18	item	100	83.617.800,00	68,70	38.101.200,00	31,30
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	3	media	20.064.000,00	3	media	100	8.650.000,00	43,11	11.414.000,00	56,89
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah yang di ikuti	12	Bulan	709.608.000,00	12	Bulan	100	709.023.079,00	99,92	584.921,00	0,08
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Operator Komputer yang disediakan	15	Orang	281.400.000,00	15	Orang	100	281.400.000,00	100,00	-	0,00

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN		
PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan dalam satu tahun	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	unit	44.212.000,00	8	unit	100	44.112.000	99,77	100.000,00	0,23
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya		18	unit	115.723.000,00	18	unit	100	114.593.000	99,02	1.130.000,00	0,98
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa administrasi tenaga kerja dalam satu tahun	Tercapainya jumlah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	16	Orang		16	Orang	100	209.195.120,00	99,85	-	#DIV/0!
			Jumlah Perangko materai yang tersedia dalam satu tahun		2500	lembar	209.512.640,00	2500	lembar	100	209.512.640,00		100,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa Internet dan Listrik Disnakertrans		12	Bulan	347.076.609,00	12	Bulan	100	260.632.163,00	75,09	86.444.446,00	24,91
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Supir Yang disediakan		1	Orang	19.200.000,00	1	Orang	100	19.200.000,00	100,00	-	0,00

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN		
PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 yang terpelihara	Tercapainya Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam 12 Bulan	6	unit	150.000.000,00	6	unit	100	145.835.500,00	97,22	4.164.500,00	2,78
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara		15	mesin	44.000.000,00	15	mesin	100	43.998.298,00	100,00	1.702,00	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan terbayarnya honor tenaga Kebersihan		12	Bulan	662.747.000,00	12	Bulan	100	662.552.000,00	99,97	195.000,00	0,03
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12	Bulan	324.995.000,00	12	Bulan	100	321.799.649,00	99,02	3.195.351,00	0,98

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN		
PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
B.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					125.000.000,00			100	122.851.350,00	98,28	2.148.650,00	1,72	
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya Pendataan Perusahaan ,Tenaga kerja ,Lembaga Pelatihan Kerja yang ada di Kab.Bengkalis	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	1	Dokumen	125.000.000,00	1	Dokumen	100	122.851.350,00	98,28	2.148.650,00	1,72
C.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.049.988.700,00			129	2.896.195.799,00	94,96	153.792.901,00	5,04	
1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan yang memiliki sertifikat kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	216	orang	2.899.992.400,00	304	orang	141	2.787.615.299,00	96,12	112.377.101,00	3,88
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	12	LPK	149.996.300,00	14	LPK	117	108.580.500,00	72,39	41.415.800,00	27,61
D.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					359.999.600,00			100	356.179.274,00	98,94	3.820.326,00	1,06	
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kartu Pencari Kerja (AK1) yang diterbitkan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar kerja	5000	orang	259.999.600,00	5000	orang	100	257.939.274,00	99,21	2.060.326,00	0,79
		Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Job Fair		40	Perusahaan	100.000.000,00	40	Perusahaan	100	98.240.000,00	98,24	1.760.000,00	1,76

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN	
PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.289.848.900,00			82	1.868.643.340,00	81,61	421.205.560,00	18,39
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Berpotensi dalam 1 Daerah Kab./Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang di sahkan	12	Buah	89.797.600,00	12	Buah	100	88.897.600,00	99,00	900.000,00	1,00
			Terbayarnya Honor Operator dalam satu tahun	12	Bulan		12	Bulan	100				
		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerja sama yang terdaftar	20	Perusahaan	91.654.800,00	4	Perusahaan	20	91.104.800,00	99,40	550.000,00	0,60
			Terbayarnya Honor Operator dalam satu tahun	12	Bulan		12	Bulan	100				
		Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tersusunnya Rekomendasi Dokumen UMK Tahun 2022	1	dokumen	1.525.772.300,00	1	dokumen	100	1.117.452.300,00	73,24	408.320.000,00	26,76

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN	
PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kab./Kota	Jumlah Penyelesaian Kasus HI	25	kasus	309.351.200,00	19	kasus	76	301.924.140,00	97,60	7.427.060,00	2,40
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab./Kota	Terlaksananya Forum Komunikasi Lembaga Tripartit dan Terbitnya rekomendasi UMK	4	Pertemuan	273.273.000,00	3	Pertemuan	75	269.264.500,00	98,53	4.008.500,00	1,47
URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI						280.000.000,00			90	275.149.086,00	98,27	4.850.914,00	1,73
F	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					200.000.000,00			100	197.308.286,00	98,65	2.691.714,00	1,35
1	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	100	197.308.286,00	98,65	2.691.714,00	1,35

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN		
PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
G	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					80.000.000,00			80	77.840.800,00	97,30	2.159.200,00	2,70	
1	Penata Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang mengikuti dan mendapat pelatihan perbengkelan sepeda motor	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1(Satu)Daerah Kabupaten /Kota	20	orang	80.000.000,00	16	orang	80	77.840.800,00	97,30	2.159.200,00	2,70
TOTAL						17.279.929.686,00				15.988.146.137,00	92,52	1.291.783.549,00	7,48	

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN		
PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
URUSAN BIDANG TENAGA KERJA							16.999.929.686,00				15.712.997.051,00	92,43		
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.175.092.486,00			100	10.469.127.288,00	93,68	705.965.198,00	6,32	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	159.185.000,00	5	Dokumen	100	158.801.000,00	99,76	384.000,00	0,24
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam 12 Bulan	12	bulan	6.616.296.137,00	12	bulan	100	6.099.493.195,00	92,19	516.802.942,00	7,81
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa tenaga keamanan yang tersedia dalam satu tahun	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	38	Orang	691.200.000,00	38	Orang	100	691.200.000,00	100,00	-	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimibingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13	Orang	149.902.000,00	13	Orang	100	143.160.684,00	95,50	6.741.316,00	4,50

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN		
PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik yang tersedia	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	item	30.000.000,00	11	item	100	28.948.000,00	96,49	1.052.000,00	3,51
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12	Bulan	175.732.100,00	12	Bulan	100	175.685.800,00	99,97	46.300,00	0,03
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat yang disediakan makan dan minuman		50	kali	302.520.000,00	50	kali	100	267.230.000,00	88,33	35.290.000,00	11,67
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		18	item	121.719.000,00	18	item	100	83.617.800,00	68,70	38.101.200,00	31,30
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		3	media	20.064.000,00	3	media	100	8.650.000,00	43,11	11.414.000,00	56,89
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah yang di ikuti		12	Bulan	709.608.000,00	12	Bulan	100	709.023.079,00	99,92	584.921,00	0,08
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Operator Komputer yang disediakan		15	Orang	281.400.000,00	15	Orang	100	281.400.000,00	100,00	-	0,00

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN			
PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan dalam satu tahun	8	unit	44.212.000,00	8	unit	100	44.112.000	99,77	100.000,00	0,23		
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	18	unit	115.723.000,00	18	unit	100	114.593.000	99,02	1.130.000,00	0,98		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa administrasi tenaga kerja dalam satu tahun	16	Orang	209.512.640,00	16	Orang	100	209.195.120,00	99,85	209.512.640,00	100,00		
			Jumlah Perangko materai yang tersedia dalam satu tahun	2500	lembar		2500	lembar	100						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa Internet dan Listrik Disnakertrans	12	Bulan	347.076.609,00	12	Bulan	100	260.632.163,00	75,09			86.444.446,00	24,91
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Supir Yang disediakan	1	Orang	19.200.000,00	1	Orang	100	19.200.000,00	100,00			-	0,00

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN		
PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 yang terpelihara	Tercapainya Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam 12 Bulan	6	unit	150.000.000,00	6	unit	100	145.835.500,00	97,22	4.164.500,00	2,78
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara		15	mesin	44.000.000,00	15	mesin	100	43.998.298,00	100,00	1.702,00	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan terbayarnya honor tenaga Kebersihan		12	Bulan	662.747.000,00	12	Bulan	100	662.552.000,00	99,97	195.000,00	0,03
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12	Bulan	324.995.000,00	12	Bulan	100	321.799.649,00	99,02	3.195.351,00	0,98

URAIAN		TARGET					REALISASI					SISA ANGGARAN		
PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	JUMLAH	SATUAN	Rp	JUMLAH	SATUAN	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
B.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					125.000.000,00			100	122.851.350,00	98,28	2.148.650,00	1,72	
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya Pendataan Perusahaan ,Tenaga kerja ,Lembaga Pelatihan Kerja yang ada di Kab.Bengkalis	Terlaksananya Penyusuna Rencana Tenaga Kerja	1	Dokumen	125.000.000,00	1	Dokumen	100	122.851.350,00	98,28	2.148.650,00	1,72
D	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					359.999.600,00			100	356.179.274,00	98,94	3.820.326,00	1,06	
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kartu Pencari Kerja (AK1) yang diterbitkan	Terlaksananya Pengelolahan Informasi Pasar kerja	5000	orang	259.999.600,00	5000	orang	100	257.939.274,00	99,21	2.060.326,00	0,79
		Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Job Fair		40	Perusahaan	100.000.000,00	40	Perusahaan	100	98.240.000,00	98,24	1.760.000,00	1,76

BAB V

PENUTUP

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, kewenangan di bidang keteangakerjaan dan ketransmigrasian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis program-program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana diamanatkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Dari 2 (dua) sasaran perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang juga telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 114,78% (seratus empat belas koma tujuh puluh delapan persen) dengan kategori nilai capaian kinerja “tinggi”. Secara umum capaian kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan sasaran kinerja program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Tingkat Kompetensi, Daya Saing dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan target 100% (seratus persen) telah direalisasikan sebesar 100% (seratus persen) dengan capaian kinerja 100% (seratus persen);
2. Tingkat Kesempatan Kerja dengan target 95% (sembilan puluh lima persen) telah direalisasikan sebesar 93,37% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dengan capaian kinerja 98,28% (sembilan puluh delapan koma dua puluh delapan persen);
3. Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan dengan target 24% (dua puluh empat persen) telah direalisasikan sebesar 94,74% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh empat persen) dengan capaian kinerja 394,75% (tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh lima persen);

4. Tingkat Kemandirian Transmigran dengan target 100% (seratus persen) telah direalisasikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dengan capaian kinerja 65% (enam puluh lima persen);
5. Predikat Akuntabilitas Kinerja dengan target BB telah direalisasikan predikatnya adalah BB.

Dari capaian yang telah dijelaskan beberapa sasaran masih perlu mendapatkan perhatian sangat serius dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni urusan ketransmigrasian. Mengingat perlunya memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya masyarakat transmigran yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.